

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SOLOK DALAM PENEGAKKAN HUKUM MENURUT PASAL 46
DAN PASAL 47 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 KOTA
SOLOK TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

YANDRI
201000474201016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
KOTA SOLOK
2024**

No. Register : 523/FHUK-UMMY/IV-2024

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA SOLOK DALAM PENEGAKKAN HUKUM MENURUT
PASAL DAN PASAL 47 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022
KOTA SOLOK TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM**

**Nama : Yandri, Nim: 201000474201016, Fakultas Hukum
Universitas Mahaputa Muhammad Yamin Kota Solok .
Pembimbing 1 : Yulfa Mulyeni, SH.,MH.
Pembimbing 2 : Eri Arianto, SH.,MH, 2024, hal 64**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat terhadap aktivitas tempat hiburan malam / karaoke keluarga yang sangat meresahkan dan diduga banyak terjadi perbuatan-perbuatan asusila yang terjadi di Kota Solok khususnya dalam ruangan / room karaoke keluarga tersebut. Kota Solok salah satu daerah yang menaruh perhatian khusus terhadap pekat / penyakit masyarakat yang dikhawatirkan dapat merusak kultur masyarakat kota Solok. Kota Solok memiliki slogan "*Kota beras serambi medinah*" yang berarti Kota penghasil beras yang berkultur islam, salah satu bukti keseriusan Pemerintah Daerah Kota Solok dalam usaha memerangi penyakit masyarakat ialah dengan diundangkan nya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Dimana peraturan daerah ini mengatur tentang sembilan (9) Tertib, salah satunya tertib tempat hiburan yang diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang ketentraman dan ketertiban umum, serta apa saja kendala dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dilingkungan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, dan observasi lapangan yang dilakukan saat pra penelitian maupun penelitian oleh penulis terhadap tempat tempat hiburan / karaoke keluarga di wilayah Kota Solok. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang ketentraman dan ketertiban umum belum terlaksana dengan maksimal dan menemukan beberapa kendala yang menyebabkan mekanisme sistim kerja belum terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hartiwiningsih, 2019. *Meneliti Pengujian Peraturan Daerah dalam Bingkai Hukum Responsif*. Surakarta: Unida-Press

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram university press, Mataram 2020

Obsatar Sinaga. 2010. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*, Bandung: Lepsindo

Rahmawati Surutama, 2020. *Pengawasan Pemerintah*, Bandung: Cendekiawan Press

Rahyunir Rauf. 2018. *Azas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Nusa Media

Rudy. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Sri Kusriyah. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: UNISSULA PRESS.

Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Kota Solok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Peraturan Walikota No. 06 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Jurnal

Dedy Suhendi, Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakkan Peraturan Daerah, vol.3 (2).2021.

Dedy Suhendi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, vol.1 (1). 2021

Muhammad Ilham Effendy, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau, vol.8 (1), 2020

Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakkan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Sisi Perspektif Sosiologi Hukum, vol.10,(2), 2022

